

2020

# RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN ANGGARAN 2021



**DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PONTIANAK**



## KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dinas Perhubungan Kota Pontianak menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 (Tahun ke-2) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 s/d 2024.

Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja Dinas menuju Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang responsive dan aspiratif.

Pontianak, Juli 2020  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Pontianak,

Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI .M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680410 199503 2 006



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra ...	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD .....	30
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal PD .....	39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	40
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	51
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	57
3.3. Program dan Kegiatan .....	63
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	75
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan PD .....	75
V. PENUTUP .....	91



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selain itu Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan salah satu dokumen yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

### 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008, tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kota Pontianak;



13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010 – 2014;
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 149);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 64 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 64);
18. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 42 Tahun 2019, tanggal 4 Juli 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2020;
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 85 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
20. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 712/Dishubkominfo/Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
21. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019;



22. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019;
23. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
24. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dinas Perhubungan merupakan Perangkat Daerah (PD) dan berkewajiban untuk membuat Renja PD untuk Priode 1 Tahun ( 2021 ) yang merupakan tahun ke-1, dan memuat tentang Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Program serta Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak serta berpedoman kepada RPJMD, RKPD Kota Pontianak dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dan semakin berubah dengan akselerasi yang tinggi dan kompleks sebagai akibat adanya globalisasi seperti dewasa ini, maka Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara kontinyu melakukan perubahan – perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan, konsistensi, dan berkelanjutan, sehingga dapat optimal dalam melakukan kinerja yang berorientasi kepada Pembangunan Masyarakat Kota Pontianak yang berwawasan lingkungan dan tentunya tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis yang secara hirarkis akan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perencanaan kerja sangat penting bagi upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan karena hal yang akan diungkapkan dalam Rencana Kerja (Renja) pada dasarnya adalah apakah indikator sasaran (*outcomes*) pada setiap kegiatan akan dapat mendukung pencapaian sasaran atau apakah *outcomes*





sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Apabila sudah sesuai maka langkah selanjutnya adalah penetapan besarnya target sasaran dan anggaran yang diperlukan pada tahun berjalan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, dan perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta penjelasan mengenai program dan kegiatan Tahun Rencana (Tahun 2021).

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Kerja berupa rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

##### **BAB V. PENUTUP**

Dalam Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.





## BAB II

## HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam rencana jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2020-2024, dan pada tahun pertama (2020) atau tahun berjalan, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Pontianak dalam pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis serta program yang dilaksanakan pada tahun 2019 (n-2) dan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) yaitu sebagaimana berikut :

1. Sasaran ***Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
  - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  - 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor.
  - 3) Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur.
  - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  - 5) Program Peningkatan Pelayanan Prima.
  
2. Sasaran ***Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
  - 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
  - 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan.
  
3. Sasaran ***Terwujudnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Pontianak***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
  - 1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.



- 2) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ.
  - 3) Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ.
  - 4) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
  - 5) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
4. Sasaran ***Terwujudnya Kinerja Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
- 1) Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).
  - 2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP.
  - 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Adapun secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan pada tahun 2019 dan tahun 2020 (tahun berjalan), sebagaimana Tabel T-C.29 berikut ini:



Tabel T-C.29  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN  
 PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015 s/d TAHUN 2019 (Program Strategis/Pembangunan)  
 KOTA PONTIANAK**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019 (n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
	Urusan Perhubungan									
	Bidang Urusan Lalu Lintas dan ASDP									
	A. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1 Persentase APILL dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Terpelihara Dalam Kondisi Baik.	100%	94.69%	98%	95.23%	97.17%	100%	34.55%	34.55%
	B. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.	1 Persentase Tersedianya Kebutuhan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Yang Baik.	100%	93.30%	95%	89.92%	94.65%	100%	13.53%	13.53%
	C. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ.	1 Persentase Lokasi Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan lancar.	100%	92.81%	100%	90.19%	90.19%	100%	66.01%	66.01%
	D. Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai Danau dan Penyeberangan	1 Persentase Berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan.	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	0%	0.00%
	E. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP.	1 Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai.	100%	87.69%	100%	73.93%	73.93%	100%	6.67%	6.67%
	F. Program Peningkatan Pelayanan ASDP.	1 Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai.	100%	94.98%	100%	97.63%	97.63%	100%	54.45%	54.45%
	G. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.	1 Persentase Jumlah Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR).	100%	91.27%	100%	78.39%	78.39%	100%	57.30%	57.30%

Catatan : Realisasi Tahun 2019 (tahun berjalan) sampai dengan bulan Juni 2019 (Triwulan ke 2)



Sedangkan pada tahun 2020 (n-1 / tahun berjalan) hingga triwulan 2 rata-rata telah mencapai 60,31%. Untuk lebih jelasnya secara rinci realisasi dan capaian program pembangunan bidang perhubungan dijelaskan sebagaimana berikut ini :

- 1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.  
Target yang ingin dicapai pada program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ untuk tahun 2020 sebesar 100% dan terealisasi 28,17% sampai dengan triwulan 2.
- 2) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ.  
Pada program ini di tahun 2020 hingga triwulan ke 2 baru mencapai 16% dari target 100%.
- 3) Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ.  
Pencapaian target pada program ini pada tahun 2020 triwulan 2 sebesar 37,38% dari 100% rencana.
- 4) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.  
Target yang ingin dicapai pada program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor untuk tahun 2020 sebesar 100% dan realisasi tercapai sampai dengan triwulan 2 adalah 34,81%.
- 5) Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).  
Pada tahun 2020 dari rencana target 100%, hingga triwulan ke 2 baru terealisasi 5,47%.
- 6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP  
Pada tahun 2020 pencapaian target program ini dari rencana target 100%, hingga triwulan ke 2 belum terealisasi. Yang mana kegiatan pembangunan pelabuhan dan dermaga kota Pontianak belum terbangun fasilitas dermaganya, yang ditargetkan 2 fasilitas dermaga yang akan di bangun.
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.



pada tahun 2020 dari rencana target 100%, hingga triwulan ke 2 sudah mencapai 41,13%.

- 8) Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU).  
Tahun 2020 sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi 73,46%. Kegiatan yang menunjang capaian realisasi cukup tinggi adalah pada kegiatan operasional Penerangan Jalan Umum (PJU).

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Di Bidang Perhubungan.

#### 1. Pelayanan Angkutan Jalan

Pelayanan angkutan jalan yang merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak, yang terdiri dari :

##### a. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan.

Pelayanan dasar jaringan prasarana angkutan jalan merupakan pelayanan dalam penyediaan prasarana dasar berupa Terminal dan Halte dengan fasilitas yang layak yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa. Adapun jumlah Halte dan Terminal di Kota Pontianak hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Lokasi Halte Di Kota Pontianak  
Hingga Tahun 2019**

NO.	LOKASI	TAHUN PEMBUATAN	Jumlah Halte	Kondisi
1	Halte Akcaya Jl. St. Syahrir	2016	1	Baik
2	Halte S. Parman Jl. S. Parman	2016	1	Baik
3	Halte SMAN 2 Jl. Martadinatha	2016	1	Baik
4	Halte SMP 5 Jl. Hasanudin	2016	1	Baik
5	Halte SMK4 Jl. Kom Yos Sudarso	2016	1	Baik
6	Halte Sekolah Terpadu Jl. Tj. Raya 2	2016	1	Baik
7	Halte Tugu Khatulistiwa Jl. Khatulistiwa	2016	1	Baik
8	Halte Tugu Digulis Jl A. Yani		1	Baik



NO.	LOKASI	TAHUN PEMBUATAN	Jumlah Halte	Kondisi
9	Halte Mujahidin Jl. A. Yani		1	Baik
10	Halte MAN 2 Jl. A. Yani		1	Baik
11	Halte P. Natakusuma Jl. P. Natakusuma		1	Baik
12	Halte Sultan Hamid Jl. St. Hamid		1	Baik
13	Halte Simpang Tanjung Raya Jl. Perintis Kemerdekaan		2	Baik
14	Halte Simpang Tanjung Hulu Jl. Perintis Kemerdekaan		2	Baik
15	Halte Sekolah Asisi Jl. G. Situt Machmud		1	Baik
16	Halte STM1 Jl. Khatulistiwa		1	Baik
<b>JUMLAH</b>			<b>18</b>	

b. Fasilitas Perlengkapan Jalan.

Pelayanan Dasar penyediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa Rambu-rambu lalu lintas, Marka Jalan dan Guardrail serta kelengkapan lainnya berupa Zebra Cross, Traffic Light, Warning Light dan CCTV. Adapun jumlah Traffic Light hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Lokasi Traffic Light  
Di Kota Pontianak Hingga Tahun 2019**

NO	SIMPANG	KONDISI
1	Jl. Tanjungpura – Jl. Diponegoro	Baik
2	Jl. Pattimura – Jl. Gajahmada	Baik
3	Jl. Ahmad Yani – Jl. Gusti Sulung Lelanang	Baik
4	Jl. Pahlawan – Jl. Gajahmada (Flamboyan)	Baik
5	Jl. Imam Bonjol – Jl. Pahlawan (Hotel Garuda)	Baik
6	Jl. Tanjung Raya I – Jl. Tanjung Raya II (Tol Kapuas)	Baik
7	Jl. Tj. Raya Hilir – Jl. Kemerdekaan	Baik
8	Jl. Situt Mahmud – Jl. 28 Oktober	Baik
9	Jl. Ahmad Yani – Bundaran Untan	Baik
10	Jl. Ahmad Yani – Jl. Sungai Raya Dalam	Baik
11	Jl. ST. Abdurahman – Jl. Johan Idrus	Baik
12	Jl. Pattimura – Jl. Ir. H. Juanda	Baik



NO	SIMPANG	KONDISI
13	Jl. KH. Dahlan – Jl. Johar	Baik
14	Jl. Alianyang – Jl. Gusti Hamzah	Baik
15	Jl. Dr. Sutomo – Jl. Nata Kesuma	Baik
16	Jl. H. Rais A. Rahman – Jl. KHW. Hasyim	Baik
17	Jl. Jeranding – Jl. Gusti Hamzah	Baik
18	Jl. HM. Suwignyo – Jl. H. Rais A. Rahman	Baik
19	Jl. HM. Suwignyo – Jl. Uray Bawadi	Baik
20	Jl. Alianyang – Jl. KHW. Hasyim	Baik
21	Jl. Uray Bawadi – Jl. ST. Syahrir (Milik Kementerian)	Baik

**Pengecatan dan Jumlah Zebra Cross dan Kebutuhannya  
Hingga Tahun 2019**

	HINGGA 2018	2019
<b>LOKASI ZEBRA CROSS</b>	<b>51 LOKASI</b>	<b>10 LOKASI</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>61</b>	

**Pengecatan Marka Jalan  
Tahun 2019**

NO	MARKA	LOKASI
1	MARKA JALAN	JL. Suwignyo, Jl. Ahmad Yani, Jl. Gusti S. Lelanang, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jl. Johan Idrus, dan Jl. Danau Sentarum
2	Marka Sepeda Motor	Jl. Ahmad Yani (Pemeliharaan)
3	Marka Sepeda	JL. KH. Ahmad Dahlan, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. Sultan Abdurrahman (Pemeliharaan)

**Lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS)  
Hingga Tahun 2019**

NO	NAMA LOKASI DAN JALAN	TAHUN PEMBUATAN
1.	Depan SMP Negeri 9 Jl. Pangeran Nata Kesuma	2014
2.	Depan SD Negeri 34 Jl. Prof. Muhammad Yamin	2014
3.	Depan SD Negeri 17 Jl. Putri Candra Midi	2015
4.	Depan SD Bawamai Jl. KH. Ahmad Dahlan	2015
5.	Depan SD Bina 45 Jl. Tanjung Raya II	2015





NO	NAMA LOKASI DAN JALAN	TAHUN PEMBUATAN
6.	Depan SDN 3 dan MTS Al-Irsyad Jl. Tanjung Raya II	2015
7	Depan SMP Negeri 1 Jl. Merdeka	2016
8	Depan SMKN 1 Jl. Danau Sentarum	2016
9	Depan SD Bawari Jl. Merdeka	2016
10	Depan SD Negeri 01 Jl. Suprpto	2016
11	Depan MIN Pal V Jl. Husein Hamzah	2016
12	SMP Negeri 13 Jl. Tebu	2017
13	SMP Negeri 5 Jl. Hasanudin	2017
14	SMK Negeri 2 Jl. Khatulistiwa	2017
15	SMP Negeri 10 Jl. WR. Supratman	2018
16	SMP Negeri 16 Jl. Martadinata	2018
17	SD Negeri 31 Jl. Tabrani Ahmad	2018
18	SD Negeri 34 Kec. Pontianak Kota	2019
19	SD Negeri 06 Kec. Pontianak Selatan Jl. S. Parman	2019

### Lokasi ATCS/CCTV di Kota Pontianak

Tahun 2019

No	Lokasi	Jumlah Kamera	Kondisi	Tahun Pemasangan
1.	Bardan – Rahadi Usman (Tugu Adipura)	4	Baik	2015
2.	Jl. ST. Abdurahman – Jl. Johan Idrus (Simpang Jihad)	3	Baik	2015
3.	Jl. Ahmad Yani - Bundaran UNTAN	4	Baik	2016
4.	Jl. Ahmad Yani (Simpang Pajak)	4	Baik	2016
5.	Jl. Tanjung Raya I- Jl. Tanjung Raya II	4	Baik	2016
6.	Jl. Tanjungpura – Jl. Diponegoro (Parit Besar)	3	Baik	2016
7	Jl. Imam Bonjol – Jl. Pahlawan (Hotel Garuda)	4	Baik	2017
8	Jl. Pahlawan – Jl. Gajahmada (Flamboyan)	4	Baik	2017
9	Jl. Pattimura – Jl. Gajahmada	3	Baik	2016
10	Jl. Antasari – Jl. Diponegoro	3	Baik	2017
11	Jl. Asahan – Jl. Tanjungpura	3	Baik	2017



No	Lokasi	Jumlah Kamera	Kondisi	Tahun Pemasangan
12	Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Trans Kalimantan	4	Baik	2017
13	Jl. 28 Oktober – Jl. Perintis Kemerdekaan	4	Baik	2017
14	Simpang Johar	3	Baik	2018
15	Simpang Pancasila	3	Baik	2018
16	Simpang Suwignyo	3	Baik	2018
17	Pasar Sentral	3	Baik	2018
18	Simpang Matahari	3	Baik	2018
19	U Turn (Depan Ex, POM Bensin OSO)	4	Baik	2018
20	Dibawah JPO Depan Ayani Mega Mall	4	Baik	2018
21	Simpang Polda	2	Baik	2018
22	Simpang Gertak I	4	Baik	2019
23	Simpang Gertak III	4	Baik	2019
24	Simpang Jeranding	4	Baik	2019
25	Simpang Syakirin	4	Baik	2019
26	Ferry Penyeberangan Bardan	2	Baik	2019
27	Simpang Uray Bawadi – St. Syahrir	2	Baik	2019
28	Depan Rumah Radakng	2	Baik	2019
<b>Jumlah .....</b>		<b>84</b>		

**Rekapitulasi Jumlah PJU di Kota Pontianak  
Pada Jalan Primer/Arteri/Sekunder Per Desember 2019**

No.	LOKASI	SATUAN	YANG DI BUTUHKAN	BELUM ADA PJU	YG SUDAH TERPASANG
1.	Kecamatan Pontianak Selatan	Titik Lampu	994	110	884
2.	Kecamatan Pontianak Tenggara	Titik Lampu	533	72	461
3.	Kecamatan Pontianak Barat	Titik Lampu	503	95	408
4.	Kecamatan Pontianak Kota	Titik Lampu	580	171	409



5.	Kecamatan Pontianak Timur	Titik Lampu	438	135	303
6.	Kecamatan Pontianak Utara	Titik Lampu	490	264	226
	<b>Jumlah</b> .....	<b>Titik Lampu</b>	<b>3.538</b>	<b>847</b>	<b>2.691</b>

**Rekapitulasi Jumlah PJU di Kota Pontianak  
Pada Jalan Gang/Lingkungan/Komplek Per Desember 2019**

No.	LOKASI	SATUAN	SUDAH ADA PJU	BELUM ADA PJU	YG SUDAH TERPASANG
1.	Kecamatan Pontianak Selatan	Titik Lampu	1.959	195	1.764
2.	Kecamatan Pontianak Tenggara	Titik Lampu	1.889	117	1.772
3.	Kecamatan Pontianak Barat	Titik Lampu	2.003	229	1.774
4.	Kecamatan Pontianak Kota	Titik Lampu	2.374	146	2.228
5.	Kecamatan Pontianak Timur	Titik Lampu	1.635	204	2.083
6.	Kecamatan Pontianak Utara	Titik Lampu	1.778	405	1.904
	<b>Jumlah</b> .....	<b>Titik Lampu</b>	<b>11.638</b>	<b>1.296</b>	<b>11.525</b>



***Jumlah dan Kebutuhan Rambu-Rambu Lalu Lintas  
di Kota Pontianak Hingga Tahun 2020***

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>JUMLAH HINGGA TAHUN KE</b>	<b>Capaian Target Kebutuhan (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>2015</b>	2.500 buah rambu	1.352 buah rambu	54,08	Jumlah Pengadaan Tahun 2015 sebanyak 294 buah
<b>2016</b>	2.500 buah rambu	1.614 buah rambu	64,56	Jumlah Pengadaan Tahun 2016 sebanyak 262 buah
<b>2017</b>	2.500 buah rambu	1.708 buah rambu	68,32	Jumlah Pengadaan Tahun 2017 sebanyak 94 buah
<b>2018</b>	2.500 buah rambu	1.772 buah rambu	70,88	Jumlah Pengadaan Tahun 2018 sebanyak 64 buah
<b>2019</b>	2.500 buah rambu	1.843 buah rambu	73,72	Jumlah Pengadaan Tahun 2019 sebanyak 71 buah
<b>2020</b>	2.500 buah rambu	1893 buah rambu	75,72	Rencana Pengadaan Tahun 2020 sebanyak 50 buah

c. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Untuk memenuhi standar laik jalan angkutan umum orang dan barang, Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara intensif melakukan peningkatan proses Uji KIR Kendaraan Bermotor yang dilakukan dan dikelola oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.



**Jumlah Target dan Capaian Pengujian Kendaraan Bermotor  
Dari Tahun 2015-2019**

TAHUN	TARGET	REALISASI	Capaian %
2015	13.299 Unit	12.239 Unit	92,03
2016	15.851 Unit	14.715 Unit	92,83
2017	15.492 Unit	14.139 Unit	91,27
2018	15.870 Unit	12.441 Unit	78,39
2019	15.942 Unit	12.533 Unit	78,61

2. Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Jenis Pelayanan Dasar ini terdiri dari :

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Pelayanan ini merupakan kegiatan pelayanan bongkar muat orang dan barang serta penyediaan kapal penyeberangan yang memberikan kemudahan dan kelancaran bagi masyarakat dalam melintasi/ menyeberang sungai dalam kota.

Tingkat Ketersediaan Fasilitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan

No	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Target 2019		Realisasi Hingga 2019		90%
1	Jumlah fasilitas dan prasarana pelabuhan/ dermaga yang diperlukan	15	Fasilitas	12	Fasilitas	86,6
2	Jumlah Penyediaan Fasilitas Sarana Pengawasan Perairan Kota Pontianak	5	Fasilitas	4	Fasilitas	80
	<b>Rata-Rata % Capaian</b>					<b>83,3</b>
	<b>Kategori</b>	<b>Berhasil</b>				

Hingga tahun 2019 jumlah dermaga di Kota Pontianak berjumlah sebanyak 12 buah dermaga dari target 15 fasilitas dermaga hingga tahun 2019 atau 90%.



- Dermaga Laut Senghie
- Dermaga Sampan Bermotor Senghie
- Dermaga Pedalaman Senghie
- Dermaga Sampan Bermotor BCA
- Dermaga Kapuas Indah
- Dermaga Sampan Bermotor Siantan
- Dermaga Kapuas Besar
- Dermaga Sampan Bermotor Seduit
- Dermaga Penyeberangan Bardan
- Dermaga Sampan Bermotor Bardan
- Dermaga Penyeberangan Siantan
- Garasi Speed Boat Patroli

**Jumlah Aktivitas Pelayanan  
Ferry Penyeberangan Bardan-Siantan Tahun 2015-2019**

N o.	Jenis/Golongan Pengguna Jasa Penyeberangan	Satuan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Penumpang Umum (PU)	Orang	215.468	131.947	143.633	132.147	113.043
2.	Sepeda (Gol.1)	Unit	11.652	10.679	12.859	8.556	7.758
3.	Sepeda Motor (Gol.2)	Unit	822.443	821.102	877.975	779.678	773.414
4.	Sepeda Motor Berboncengan (Gol.2.B)	Unit	510.931	491.804	525.449	469.205	441.047
5.	Sepeda Motor Diatas 500cc/Roda 3 (Gol.3)	Unit	1.640	1.388	1.268	1.257	1.022
6.	Kendaraan Roda 4 (Gol.4)	Unit	40.035	29.710	26.267	27.547	23.135
7.	Kendaraan Roda 4 Bermuatan (Gol.4.M)	Unit	61.469	56.513	56.502	60.988	55.018
8.	Kendaraan Roda 6 (Gol.5)	Unit	46.864	47.034	55.271	54.695	48.365
9.	Kendaraan Roda 6 Bermuatan (Gol.5.M)	Unit	55.575	46.078	55.050	54.713	45.585
<b>10</b>	<b>Jumlah Frekwensi Pelayanan</b>	<b>Trip</b>	<b>20.246</b>	<b>33.096</b>	<b>34.548</b>	<b>36.702</b>	<b>31.778</b>



**Pelayanan Aktivitas Sandar Kapal Di Pelabuhan dan Dermaga  
Kota Pontianak Tahun 2015-2019**

TAHUN	Aktivitas Sandar Kapal Di Pelabuhan Pedalaman				Sandar Kapal Laut	JUMLAH
	Satuan	Pel. Kapuas Indah	Pel. Kapuas Besar	Pel. Senghie	Pel. Senghie	
2015	Kali Sandar	2.101	1.342	2.402	1.822	7.667
2016	Kali Sandar	1.935	1.465	2.974	2.176	8.550
2017	Kali Sandar	2.042	1.901	2.639	2.070	8.652
2018	Kali Sandar	1.690	2.033	2.375	1.609	7.707
2019	Kali Sandar	1.703	1.815	2.358	1.512	7.388
<b>Jumlah</b>	<b>Kali Sandar</b>	<b>9.471</b>	<b>8.556</b>	<b>12.748</b>	<b>9.189</b>	<b>39.964</b>

b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Pelayanan dasar ini berupa penyediaan dermaga angkutan sungai dan sampan bermotor serta Dermaga Penyeberangan beserta fasilitasnya, yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kemudahan/ kelancaran pengguna jasa dermaga/pelabuhan penyeberangan.

Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut ini :





Tabel T-C.30.a  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN (INDIKATOR CAPAIAN SASARAN) PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2017-2019 dan Rencana Tahun 2020

No	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perhubungan.			Pedikat	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB	
2	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan.			Pedikat	BB	A	A	A	BB	A	A	A	
3	Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti. Pada Dinas Perhubungan.			%	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat Kinerja Pelayanan Ruas Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak. <i>Formulasi:</i> ( Volume / Capacity Ratio )			Tingkat Pelayanan	A	A	-	-	B	B	-	-	
5	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas. <i>Formulasi:</i> (Fasilitas yg tersedia / Fasilitas yg seharusnya)x 100			%	95	100	-	-	83,79	100	-	-	
6	Persentase Angkutan Umum, Online dan Barang Yang Lulus Uji KIR. <i>Formulasi:</i> (Jumlah yg lulus KIR / Jumlah yg diuji KIR)x 100			%	100	100	-	-	78,33	100	-	-	
7	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan. <i>Formulasi:</i> (Fasilitas yg tersedia / Fasilitas yg seharusnya)x 100			%	85	90	-	-	70	90	-	-	
8	Indek Penerangan Jalan Umum <i>Formulasi:</i> (Persentase Cakupan Penerangan Jalan Umum + Persentase Cakupan Jalan Lingkungan) : 2			%	-	-	91,09	92,74	-	-	91,09	92,74	
9	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi. <i>Formulasi:</i> (Jumlah persentase ketersediaan fasilitas transportasi yang baik)			%	-	-	78,59	80,53	-	-	78,59	80,53	
10	Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak <i>Formulasi:</i> (Volume / Capacity Ratio)			Tingkat Pelayanan	-	-	B 0,32	B 0,28	-	-	B 0,32	B 0,28	



**Tabel T-C.30.b**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN (INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM)**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019 dan Tahun 2020 (Tahun ke 1 Renstra 2020-2024)**

No	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI	
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,93%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor			95%	95%	95%	95%	95%	100%	80,42%	95%	94.42%	95%	95%	100%
3	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur			90%	95%	97.5%	100.0%	100.0%	100%	40.00%	95%	0%	100.0%	100.0%	100%
4	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
5	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan			-	100%	100%	100%	100%	SB	65.90%	80.5%	83.36%	95%	98%	SB
6	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Laporan Capaian Kinerja yang berkualitas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya Laporan Keuangan yang Tertib dan Akuntabel			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase APILL dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Terpelihara Dalam Kondisi Baik			100%	100%	95%	98%	100%	18,76%	76,59%	55.59%	94.69%	100%	100%	18,76%
9	Persentase Tersedianya Kebutuhan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Angkutan Jalan			40%	55%	90%	95%	100%	19,98%	38,96%	68.14%	89.97%	80%	100%	19,98%
10	Persentase Lokasi Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan lancar			90%	95%	95%	100%	100%	14,68%	86,58%	98.33%	92.81%	100%	100%	14,68%
11	Persentase Berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan			100%	100%	100%	100%	100%	24,52%	41,30%	95.93%	100%	100%	100%	24,52%
12	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai			97,50%	97,50%	100%	100%	100%	18,81%	68,80%	96.93%	91.33%	100%	100%	18,81%
13	Persentase Angkutan Umum dan Barang Yang Lulus Uji KIR			65%	95%	98%	100%	100%	7,35%	59,82%	92.83%	91.27%	100%	100%	7,35%
14	Persentase Peningkatan Fasilitas Pelayanan Angkutan Sungai			-	-	-	-	-	24,60%	-	-	-	-	-	24,60%
15	Persentase Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan Yang Terpasang			-	-	-	-	-	12,94%	-	-	-	-	-	12,94%



Dilihat dari perbandingan usulan anggaran berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam Renstra 2015-2019 dan tahun 2020 (Renstra 2020-2024) dengan pagu indikatif yang diberikan berdasarkan program yang ditetapkan dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.2 berikut ini :



Tabel 2.2.a  
USULAN ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PADA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019 dan Tahun 2020 (Tahun ke 1 Renstra 2020-2024)

No	URAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN PADA RENSTRA TAHUN (Renstra 2015-2019)					BERDASARKAN RENSTRA 2020-2024	PAGU INDIKATIF YANG DITETAPKAN PADA TAHUN (Renstra 2015-2019)					BERDASARKAN USULAN RENJA TAHUN 2020	PERBANDINGAN ANTARA PAGU INDIKATIF DENGAN KEBUTUHAN ANGGARAN					
		2015	2016	2017	2018	2019	Usulan 2020	2015	2016	2017	2018	2019	Pagu 2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	<b>URUSAN/BIDANG KESEKRETARIATAN</b>	2,359,676,400	2,445,000,000	5,385,000,000	4,705,000,000	5,202,000,000	5,327,449,000	2,552,795,650	2,901,135,538	5,090,024,310	3,958,736,080	5,100,488,970	5,043,404,500	108.18	118.66	94.52	84.14	98.05	94.67
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,300,000,000	1,350,000,000	1,800,000,000	2,050,000,000	2,100,000,000	3,150,449,000	1,492,494,350	1,669,320,588	1,667,813,440	2,523,067,280	2,767,204,000	2,338,412,000	114.81	123.65	92.66	123.08	131.77	74.22
2.	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor.	580,976,400	600,000,000	3,100,000,000	2,100,000,000	2,500,000,000	1,495,000,000	706,110,300	936,976,200	3,047,798,420	977,352,300	1,793,904,900	2,019,742,500	121.54	156.16	98.32	46.54	71.76	135.10
3.	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur.	113,700,000	125,000,000	250,000,000	340,000,000	350,000,000	300,000,000	159,250,000	182,155,000	235,500,000	257,800,000	284,500,000	328,250,000	140.06	145.72	94.20	75.82	81.29	109.42
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.	105,000,000	110,000,000	110,000,000	90,000,000	100,000,000	100,000,000	75,000,000	20,000,000	50,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	71.43	18.18	45.45	83.33	75.00	75.00
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.	260,000,000	260,000,000	80,000,000	80,000,000	100,000,000	120,000,000	107,650,000	69,499,250	59,479,250	74,017,500	125,288,610	124,000,000	41.40	26.73	74.35	92.52	125.29	103.33
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan.	-	-	20,000,000	20,000,000	25,000,000	40,000,000	12,291,000	-	6,650,000	32,943,000	36,142,540	36,000,000	-	-	33.25	164.72	144.57	90.00
7.	Program Peningkatan Pelayanan Prima.	-	-	25,000,000	25,000,000	27,000,000	22,000,000	-	10,851,300	22,783,200	18,556,000	18,448,920	22,000,000	-	-	91.13	74.22	68.33	100.00
8.	Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	100.00
II.	<b>URUSAN/BIDANG PERHUBUNGAN</b>	9,359,958,000	9,566,280,500	39,284,800,000	40,635,140,000	44,273,774,000	36,232,551,000	4,465,321,500	4,897,133,000	29,207,523,263	30,717,776,493	33,759,421,949	35,613,595,500	47.71	51.19	74.35	75.59	76.25	98.29
1.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.	795,000,000	609,000,000	26,354,400,000	26,336,340,000	27,129,974,000	811,000,000	468,740,000	369,270,250	21,678,352,913	21,306,112,653	23,842,539,429	811,000,000	58.96	60.64	82.26	80.90	87.88	100.00
2.	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ.	1,631,704,000	2,032,234,500	7,132,000,000	5,265,000,000	5,565,000,000	1,380,000,000	892,035,000	1,696,166,000	4,117,029,600	3,509,213,000	3,789,005,280	2,053,265,000	54.67	83.46	57.73	66.65	68.09	148.79
3.	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ.	2,282,100,000	1,867,320,000	3,960,400,000	3,140,800,000	3,795,800,000	4,199,009,840	1,619,140,500	1,865,862,750	2,399,140,750	2,990,469,840	3,985,050,840	4,228,101,840	70.95	99.92	60.58	95.21	104.99	100.69
4.	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai Danau dan Penyeberangan.	455,700,000	870,000,000	535,000,000	1,050,000,000	905,000,000	476,500,000	274,820,000	-	58,950,000	102,545,000	286,185,000	433,552,000	-	-	11.02	9.77	31.62	90.99
5.	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP.	133,000,000	403,000,000	423,000,000	533,000,000	1,053,000,000	1,745,800,000	202,650,000	258,550,000	231,750,000	226,604,000	249,970,000	1,469,812,000	152.37	64.16	54.79	42.51	23.74	84.19
6.	Program Peningkatan Pelayanan ASDP.	436,192,000	458,464,000	590,000,000	620,000,000	645,000,000	761,061,160	343,940,000	443,168,000	454,440,000	781,692,000	905,904,400	1,228,261,960	78.85	96.66	77.02	126.08	140.45	161.39
7.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.	3,626,262,000	3,326,262,000	290,000,000	3,690,000,000	5,180,000,000	870,000,000	663,996,000	264,116,000	267,860,000	1,801,140,000	700,767,000	972,590,000	18.31	7.94	92.37	48.81	13.53	111.79
8.	Program Pembangunan dan Pemeliharaan PJU	-	-	-	-	-	25,989,180,000	-	-	-	-	-	24,417,012,700	-	-	-	-	-	93.95
	<b>Jumlah Total .....</b>	<b>11,719,634,400</b>	<b>12,011,280,500</b>	<b>44,669,800,000</b>	<b>45,340,140,000</b>	<b>49,475,774,000</b>	<b>41,560,000,000</b>	<b>7,018,117,150</b>	<b>7,798,268,538</b>	<b>34,297,547,573</b>	<b>34,676,512,573</b>	<b>38,859,910,919</b>	<b>40,657,000,000</b>	<b>59.88</b>	<b>64.92</b>	<b>76.78</b>	<b>76.48</b>	<b>78.54</b>	<b>97.83</b>



Untuk Anggaran tahun 2020, penganggaran kegiatan/urusan kesekretariatan hanya sebesar 94,67% dari usulan pada Renstra dan untuk kegiatan urusan/bidang Perhubungan hanya 98,29% dari besaran usulan yang tertuang didalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2020-2024. Oleh sebab itu alokasi anggaran pada Bidang Perhubungan untuk melaksanakan program kegiatan belum dapat secara optimal sehingga pemenuhan pembangunan infrastruktur baik sarana maupun prasarana darat dan sungai masih terbatas.

Dari alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2020, berdasarkan Renstra 2020-2024 sebagaimana yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan Kota Pontianak serta realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dan grafik Pagu anggaran sebagai berikut :

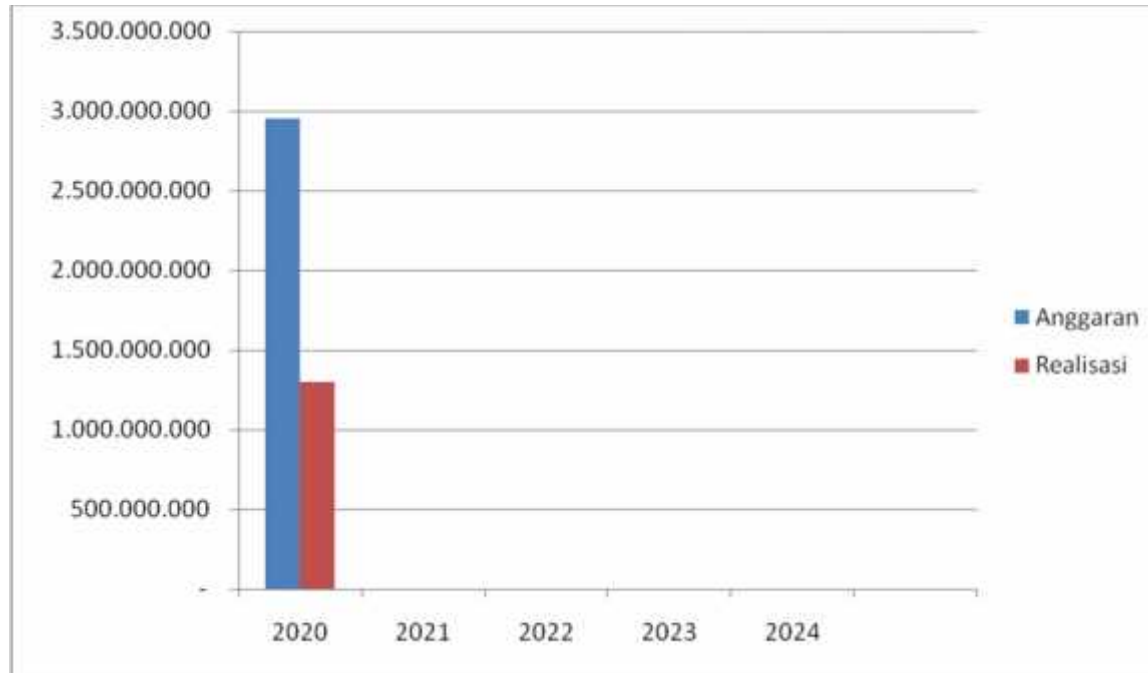


Tabel. 2.2.a  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Umum (Kesekretariatan)  
Pada Dinas Perhubungan Tahun 2020 - 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN												
		2020			2021			2022			2023			2024
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
	Program sesuai Renstra 2020-2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2020.													
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.656.585.800	679.410.187	41,01										
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatatur	933.720.000	293.289.953	31,41										
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	324.400.000	321.986.150	99,25										
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	-	0,00										
5	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	24.525.000	2.399.500	9,78										
6	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	7.800.000	0	0,00										
7	Peningkatan Pelayanan Prima	7.100.000	-	0,00										
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.954.130.800</b>	<b>1.297.085.790</b>	<b>43,90</b>										



Grafik. 2.2.a  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Umum (Kesekretariatan)  
Pada Dinas Perhubungan Tahun 2020 – 2024





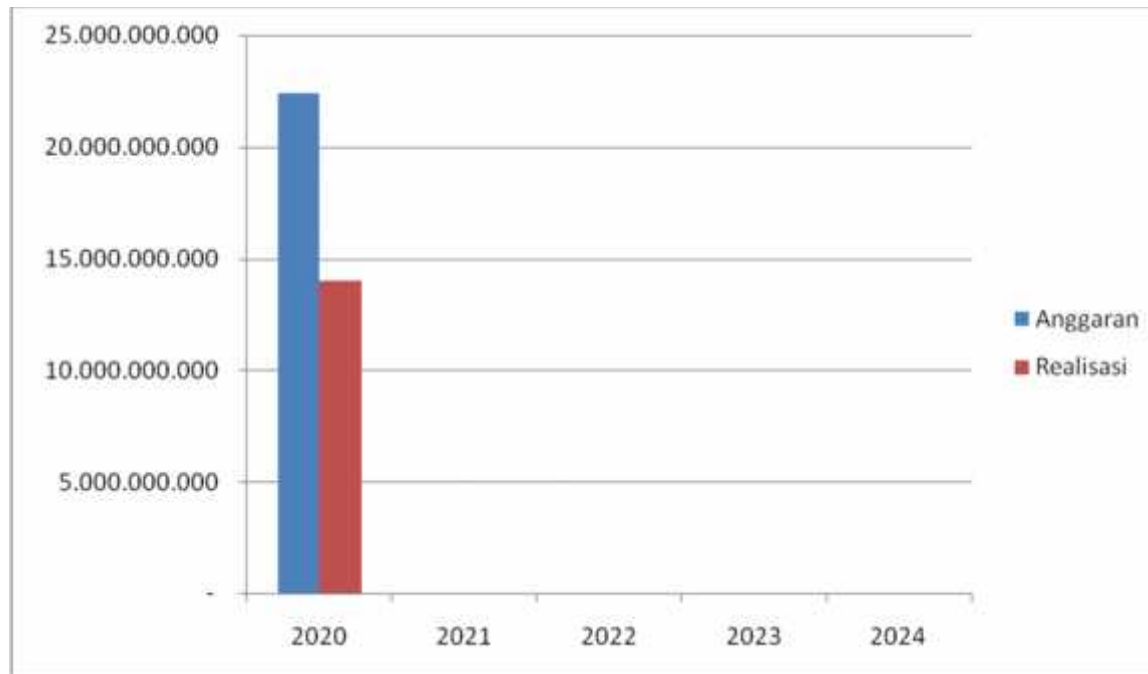


Tabel. 2.2.b  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Strategis (Bidang Perhubungan)  
Pada Dinas Perhubungan Tahun 2020 - 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN												
		2020			2021			2022			2023			2024
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
	Program sesuai Renstra 2020-2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2020.													
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	799.175.000	225.182.100	28,17										
2	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	3.132.445.600	1.170.933.383	37,38										
3	Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ	455.425.000	72.936.000	16,01										
4	Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	427.702.000	23.400.000	5,47										
5	Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	607.279.960	249.789.200	41,13										
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP	182.850.000	0	0										
7	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	236.928.000	82.480.700	34,81										
8	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	16.591.608.000	12.189.510.903	73,46										
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.433.413.560</b>	<b>14.014.232.286</b>	<b>62,47</b>										



Grafik. 2.2.b  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Strategis (Bidang Perhubungan)  
Pada Dinas Perhubungan Tahun 2020 – 2024

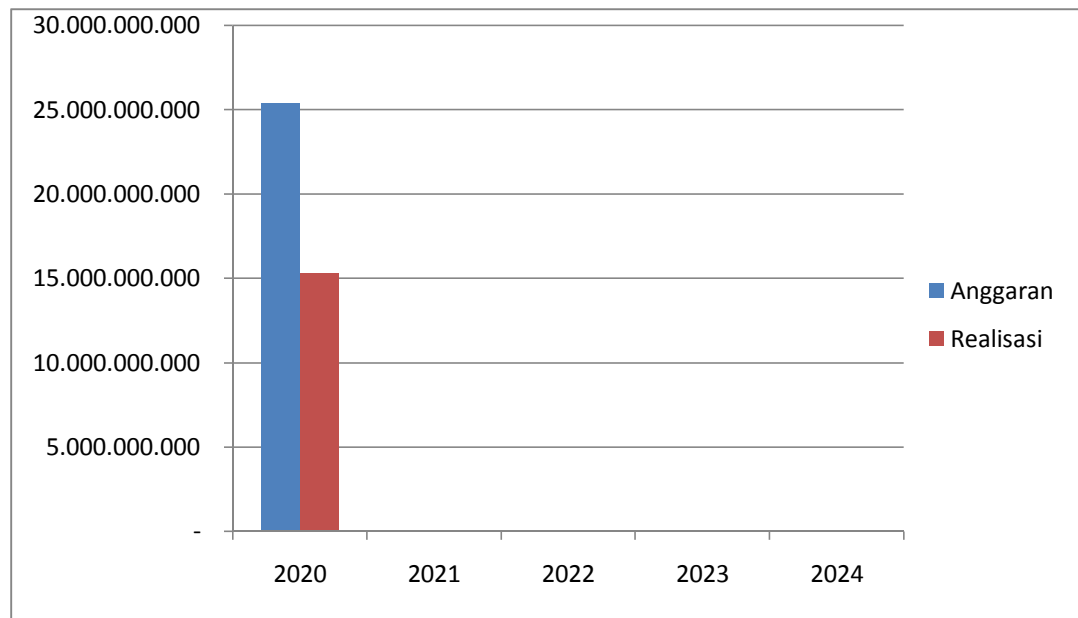




Tabel. 2.2.c  
 Total Alokasi dan Realisasi Anggaran (Bidang Sekretariat dan Perhubungan)  
 Pada Dinas Perhubungan Tahun 2020 – 2024 (Per Juni 2020)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Anggaran	25.387.544.360				
Realisasi	15.311.318.076				

Grafik. 2.2.c  
 Total Alokasi dan Realisasi Anggaran (Bidang Sekretariat dan Perhubungan)  
 Pada Dinas Perhubungan Tahun 2020 – 2024 (Per Juni 2020)





### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kota Pontianak di masa datang. Analisis isu-isu strategis telah dituangkan didalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi, serta mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu-isu strategis juga tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi. Beberapa isu strategis yang ada serta kondisi yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dituangkan dalam bentuk tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta permasalahan di bidang perhubungan, yang kemudian dituangkan sebagai Kekuatan dan Kelemahan Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

#### **2.3.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan**

Tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam pengembangan pelayanan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas di perkotaan menjadi isu strategis. Penanganan kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan multi facet ( level macro = tata ruang, Level Mezzo = transport demand, dan Level Micro = Street level), serta dinamika Kota Pontianak semakin berkembang dan merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Barat sehingga tidak terlepas dari lonjakan pertumbuhan jumlah kendaraan setiap hari/bulan/tahun serta pengguna jalan yang semakin meningkat.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan berlalu lintas sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas serta melakukan upaya yang intensif dalam hal pengawasan dan penertiban lalu lintas serta pembinaan kepada masyarakat. Selain itu perlu adanya pengembangan dan inovasi dalam upaya pembinaan dan pengawasan lalu lintas, seperti pemanfaatan perkembangan Teknologi, seperti pengembangan Inovasi BCL



(Bisnis Cakep lalu lintas Lancar) yang sedang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

3. Meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan serta meningkatnya pertumbuhan kendaraan, sehingga perlu melakukan penataan, pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap juru parkir, pemilik usaha serta pengguna jasa dalam upaya penertipan perparkiran. Selain itu perlu adanya upaya penataan pada Kawasan tertentu dengan kebijakan inovatif dalam menata perparkiran, seperti penataan dan pembangunan Gedung parkir dan penataan kembali Kawasan perdagangan dan jasa.
4. Pesatnya perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan dan lainnya serta semakin berkurang angkutan umum sehingga perlu adanya kajian dalam hal penataan kembali trayek serta mencari pola/jenis angkutan umum yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran (tepat waktu) sehingga dapat menarik bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum
5. Semakin meningkatnya teknologi yang diterapkan pada sistem transportasi sehingga perlu adanya penyesuaian dan peningkatan pendidikan Aparatur Dishub sesuai kebutuhan dan perkembangan yang ada serta berkembangnya penerapan teknologi pada jenis kendaraan sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap peralatan pengujian kendaraan, dimana kondisi yang ada saat ini sebagian besar peralatan yang digunakan merupakan peralatan tua dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini.

### **2.3.2. Peluang Pengembangan Pelayanan**

Faktor peluang pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi variabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas. Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberi pengaruh keberhasilan pencapaian visi dan misi. Adapun faktor-faktor dimaksud sebagai berikut :

1. Adanya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Adanya potensinya retribusi yang belum tergali seperti perbengkelan, kepelabuhan, serta belum dikembangkannya potensi gedung parkir dan belum dikelolanya kaitan pemanfaatan transportasi sungai sehingga dapat dijadikan



salah satu transportasi alternatif angkutan sungai dalam kota yang perlu dikembangkan dan di tata.

3. Adanya kerjasama yang baik/dukungan instansi terkait, Aparat Kepolisian dan Pelindo.
4. Berkembangnya teknologi dan media informasi, mempermudah dalam diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah dan nasional.
5. Perubahan Paradigma Kewenangan Terkait Perubahan Perundangan (Undang – undang No 14 Tahun 1992 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah dilakukan perubahan pada bulan Juni 2009 menjadi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ). Dengan adanya perubahan substansi undang-undang tersebut sangat berpengaruh terhadap koridor penanganan dan penyelenggaraan LLAJ di daerah khususnya adanya perubahan paradigma yaitu sebagai berikut :

**Perbandingan Paradigma Ketugasan  
Dinas Perhubungan Berdasarkan Perundangan**

No	UU LAMA ( No.14 Tahun 1992)	UU BARU (No.22 Tahun 2009)
1.	Lebih Banyak Penanganan Lapangan	Labih banyak melakukan Menejemen Transportasi
2.	Bertanggungjawab terhadap operasional dan menejemen	Difokuskan terhadap menejemen dan penyusunan kebijakan
3.		Perumusan Menejemen Kebijakan LL
4.		Penyusunan Rencana Induk Transportasi
5.		Penataan dan Menejemen Perparkiran
6.		Penyediaan Prasarana LLAJ
7.		Melakukan Monitoring dan evaluasi kinerja transportasi



Berdasarkan perbandingan paradigma pada table di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa paradigma Perhubungan saat ini sangat berkonsentrasi dengan tanggungjawabnya dalam melakukan perumusan kebijakan dan kegiatan manajemen lalu lintas serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan prasarana LLAJ di wilayah. Adapun kewenangan yang telah dibagi antara Perhubungan dan instansi Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

### **Pembagian Kewenangan Kepolisian RI dan Perhubungan Sesuai UU No.22 Tahun 2009**

<b>POLRI bertanggungjawab terhadap Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :</b>	<b>PEMERINTAH bertanggungjawab terhadap Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan :</b>
Program nasional Keamanan	Program nasional kegiatan keselamatan
Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan	Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan jalan
Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan	Pengkajian Masalah Keselamatan
Pengkajian masalah keamanan	Menejemen Keselamatan LLAJ
Menejemen keamanan	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan prasarana keselamatan
Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan/atau patroli	
Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi	
Penegakkan hukum	

#### **2.3.3. Permasalahan Di Bidang Perhubungan.**

Adapun permasalahan Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara umum yang perlu menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan Bidang Perhubungan, sebagai berikut :





1. Sarana dan Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem perkotaan sesuai hirarkhi rencana tata ruang masih belum optimal.
2. Masih lemahnya pemanfaatan dan penataan angkutan sungai sampan bermotor sebagai salah satu angkutan umum sungai dalam wilayah Kota Pontianak.
3. Masih kurangnya penataan dan pemanfaatan dermaga sampan bermotor sebagai salah satu prasarana/fasilitas transportasi sungai bagi masyarakat, yang memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran dalam menuju lokasi yang diinginkan.
4. Peningkatan fungsi pelabuhan penyeberangan yang ada sehingga perlu dilakukan penataan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran bagi masyarakat yang menggunakan angkutan penyeberangan.
5. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan tranportasi (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan – RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal – TATRALOK).
6. Berkembangnya usaha jasa dan kegiatan ekonomi yang begitu pesat, perlu adanya penataan secara terpadu kaitan perparkiran melalui pengembangan sistem dan manajemen perparkiran secara terpadu dan terintegrasi.
7. Jumlah angkutan umum di Kota Pontianak semakin berkurang, hal tersebut disebabkan berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum dan lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam untuk mencari solusi angkutan perkotaan serta peningkatan partisipasi/peranserta masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi.
8. Kondisi sebagian besar peralatan pengujian kendaraan bermotor merupakan peralatan tua serta kondisi bangunan gedung pengujian kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kondisi dan jenis kendaraan saat ini (kendaraan besar dan berbadan tinggi) sehingga pengujian harus dilakukan secara manual yang tentunya berpengaruh pada ke akuratan



pengujian, sehingga perlu adanya solusi dan inovasi sebagai upaya peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

9. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga perlu dilakukan mengoptimalkan pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas dan perparkiran.
10. Masih kurangnya personil dan tenaga/SDM yang mempunyai keahlian khusus bidang terminal, pengujian kendaraan bermotor, MRLL, evaluasi andalalin dan pengelolaan perparkiran.
11. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar instansi terkait dalam penataan dan rekayasa lalu lintas.
12. Terbatasnya anggaran yang menjadi pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak menyebabkan kurang optimalnya dalam mengalokasikan untuk kegiatan Rutin, kegiatan operasional dan kegiatan Fisik (investasi/sarana prasarana) sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

#### **2.3.4. Kekuatan dan Kelemahan Dinas Perhubungan.**

Kekuatan dan Kelemahan yang merupakan faktor internal yang ada dan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah :

##### **1. Kekuatan Dinas Perhubungan.**

- 1) Adanya tujuan dan sasaran dinas yang jelas sebagai arah yang ingin dicapai oleh dinas.
- 2) Sarana dan Prasarana kerja (fasilitas kerja) yang cukup memadai.
- 3) Adanya Kode Etik Pegawai yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan Budaya Kerja yang baik.
- 4) Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
- 5) Adanya SOP dan SP, sebagai acuan pelaksanaan tugas.



## **2. Kelemahan Dinas Perhubungan.**

- 1) Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima dibidang perhubungan (Kualitas dan Kuantitas SDM) sesuai spesifikasi tertentu.
- 2) Belum tersedianya database yang memadai serta terbatasnya bahan kebijakan teknis bidang transportasi, khususnya yang berkaitan dengan rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 3) Belum optimalnya Koordinasi, baik internal maupun eksternal (antar instansi terkait).
- 4) Kurang Optimalnya Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan bidang Perhubungan.
- 5) Kurang optimalnya Sarana dan Prasarana Transportasi serta kurangnya penyesuaian terhadap kemajuan teknologi, sehingga fasilitas peralatan khususnya peralatan pengujian kendaraan bermotor perlu ada peningkatan dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang ada.

Dari faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) serta faktor internal (kekuatan dan kelemahan), dituangkan ke dalam SWOT Matric sebagai berikut :



Tabel SWOT Matric

<div style="background-color: #4b0082; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <b>FAKTOR INTERNAL</b>  <b>FAKTOR EKSTERNAL</b> </div>	STRENGTH ( KEKUATAN )	WEAKNESS ( KELEMAHAN )
		1. Tujuan dan Sasaran Dinas yang Jelas. 2. Sarana & Prasarana Kerja cukup memadai. 3. Kode Etik Pegawai (Komitmen dan Budaya Kerja yang Baik). 4. Struktur Organisasi dan Tupoksi. 5. SOP, acuan pelaksanaan tugas.
OPPORTUNITY ( PELUANG )	S - O	W - O
1. Undang-Undang No. 32 Th 2004.	1. Implementasikan tujuan dan sasaran ke	1. Lakukan pengembangan SDM.
2. Potensi Retribusi yg blm tergali.	Bidang, UPTD.	2. Usulkan penambahan pegawai Yang sesuai kebutuhan.
3. Dukungan Instansi terkait.	2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi	3. Mengoptimalkan sarana dan
4. Berkembangnya Teknologi.	Retribusi PAD.	Prasarana lalu lintas/transportasi.
5. Perubahan Paradigma	3. Berdayakan sarana prasarana Kerja yang ada.	4. Meningkatkan ketersediaan data.
Kewenangan (UU No. 22 th 2009).	4. Berdayakan kode etik pegawai.	5. Usulkan Rasionalisasi Anggaran.
	5. Berdayakan struktur organisasi.	6. Penyesuaian/peningkatan
	6. Berdayakan SOP yang ada.	Peralatan sesuai teknologi.
	7. Berdayakan Undang-Undang/ Kewenangan yang ada.	7. Intensifkan koordinasi intenal dan antara instansi terkait.
THREAT(HAMBATAN/ANCAMAN)	S - T	W - T
1. Kemacetan Lalu Lintas.	1. Kembangkan & tingkatkan	1. Optimalkan jumlah Personil yang
2. Rendahnya kesadaran masyarakat	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Ada.
3. Pertumbuhan jasa usaha dan	Dan sistem transportasi yang ada.	2. Berdayakan pegawai yang
Perdagangan (kesemrautan	Serta Lakukan Survey LHR.	Mempunyai keahlian/
perparkiran).	2. Intensifkan Sosialisasi, diseminasi,	kemampuan Sesuai spesialisasi yang ada.
4. Pesatnya Perkembangan kawasan	Pembinaan & Penegakan hukum.	3. Optimalkan penggunaan
Permukiman & perdagangan, serta	3. Meningkatkan Manajemen dan	teknologi Yang ada.
Angkutan umum yg berkurang.	Penataan/pengembangan	4. Optimalkan pemanfaatan
5. Pesatnya perkembangan Teknologi (ketidaksesuaian SDM dan	Perparkiran.	anggaran yang ada
Peralatan).	4. Penataan kembali trayek yang	5. Manfaatkan sarana dan
	diintegrasikan inter & antar moda	prasarana Transportasi yg ada.
	Transportasi sesuai RTRW serta	
	studi penataan & pengembangan	
	angkutan Umum/massa.	



	5. Kembangkan dan tingkatkan	
	Kemampuan SDM dan teknologi	
	Peralatan yang ada.	

Urgensi Faktor terhadap Misi :

NU : Nilai Urgensi

BF : Bobot Faktor

Analisa kuantitatif SWOT – Strengths (Kekuatan)

No	Strengths (Kekuatan)	NU	BF	NU x BF
1.	Tujuan dan Sasaran Dinas yang Jelas.	5	35	175
2.	Sarana & Prasarana Kerja cukup memadai.	2	15	30
3.	Kode Etik Pegawai (Komitmen dan Budaya Kerja Baik).	1	15	15
4.	Struktur Organisasi dan Tupoksi.	4	20	80
5.	SOP dan SP, acuan pelaksanaan tugas.	3	20	60
	<b>Jumlah .....</b>		<b>100</b>	<b>360</b>

Analisa kuantitatif SWOT – Weaknesses (Kelemahan)

No	Weaknesses (Kelemahan)	NU	BF	NU x BF
1.	Rendahnya Kapasitas SDM.	5	30	150
2.	Lemahnya data base dan bahan Kebijakan Teknis terbatas.	1	15	15
3.	Lemahnya koordinasi.	2	15	30
4.	Alokasi Anggaran terbatas.	3	20	60
5.	Sarana Prasarana transportasi kurang optimal.	4	20	80
	<b>Jumlah .....</b>		<b>100</b>	<b>335</b>

Analisa kuantitatif SWOT – Opportunities (Peluang)

No	Opportunities (Peluang)	NU	BF	NU x BF
1.	Undang-Undang No. 32 Th 2004.	2	15	30
2.	Potensi Retribusi yg blm tergali.	4	20	80
3.	Dukungan Instansi terkait.	3	15	45
4.	Berkembangnya Teknologi dan Media informasi.	1	10	10
5.	Perubahan Paradigma Kewenangan (UU No. 22 th 2009).	5	40	200
	<b>Jumlah .....</b>		<b>100</b>	<b>365</b>



## Analisa kuantitatif SWOT – Threats (Ancaman/Hambatan)

No	Threats (Ancaman/Hambatan)	NU	BF	NU x BF
1.	Kemacetan Lalu Lintas.	3	20	60
2.	Rendahnya kesadaran masyarakat.	5	30	150
3.	Pertumbuhan jasa usaha dan Perdagangan (kesemrautan perparkiran)	4	25	100
4.	Perkembangan kawasan permukiman & perdagangan, serta angkutan umum yang berkurang.	2	15	30
5.	Pesatnya perkembangan Teknologi (ketidaksesuaian SDM dan Peralatan).	1	10	10
Jumlah .....			100	350

Adapun hasil dari analisis tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

No.	URAIAN	FORMULA	HASIL	JUMLAH
1.	Strategi SO	Hasil Tabel S + O	360 + 365	725
2.	Strategi WO	Hasil Tabel W + O	335 + 365	700
3.	Strategi ST	Hasil Tabel S + T	360 + 350	710
4.	Strategi WT	Hasil Tabel W + T	335 + 350	685

Dari penilaian tersebut dapat dilihat bahwa Strategi SO merupakan faktor yang dominan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pontianak dengan nilai 725 yang berarti menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang. Faktor lain yang mendukung yaitu Strategi ST dengan nilai 710, yang berarti Dinas Perhubungan harus dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari atau mengatasi ancaman. Dasar analisa sederhana ini akan dituangkan kedalam penetapan Misi, Sasaran, Kebijakan dan Program serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

#### 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Renja Perangkat Daerah yang merupakan penguangan dari Renstra Perangkat Daerah atau sebagai turunan dari RKPD yang merupakan penguangan dari RPJMD Kota, adalah sebuah runtutan proses atau alur mekanisme perencanaan yang harus disusun sebagai sebuah Dokumen Perencanaan.



Berdasarkan uraian tersebut, berarti rancangan awal RKPD sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam RPJMD Kota. Adapun secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk Belanja tahun 2020 adalah sebesar Rp49.006.548.167,-termasuk belanja gaji dan tunjangan PNS. Namun dengan adanya bencana Pandemi Covid-19, Anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak dilakukan pergeseran dan pengurangan anggaran guna menyesuaikan target kinerja dan target keuangan. Sampai dengan anggaran terakhir pada Anggaran Perubahan untuk belanja Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kebutuhan minimal yang dituangkan ke dalam Renstra 2020-2024 sesuai Penyelarasan Kinerja RPJMD adalah sebesar Rp42.097.642.528.

## **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Sebagaimana fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang utama yaitu memberikan Pelayanan kepada masyarakat di bidang Perhubungan dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana Lalu Lintas, maka dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya mengacu kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kebutuhan tersebut dapat berupa penyediaan fasilitas lalu lintas darat dan sungai, kemudahan dan penyediaan fasilitas angkutan penyeberangan, angkutan umum, kelancaran dan kemudahan berlalu lintas serta perparkiran.

Usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai yaitu melalui proses Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota (Forum SKPD) serta penyesuaian dengan kondisi terkini kebutuhan saat perencanaan.

Adapun Kegiatan yang merupakan usulan dari Kecamatan sebagai hasil proses dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD yaitu sebagaimana berikut :



Laporan Hasil Musranbang Kecamatan

Laporan Hasil Musranbang Kecamatan

Tahun Anggaran : 2021

Kecamatan : Pontianak Tenggara

NO	FUNGSI URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET SASARAN	SUMBEK Dana					DANA TAHUN SEBELUMNYA	KETERANGAN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
						APBD KOTA	APBD PRR	APBN	PARTISIPASI MASYARAKAT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan	Program Perbaikan Prasarana dan Sarana LALAI	Pembangunan Perawatan Jalan Urutan	Gg.H.Hasan RT.003/RW.004, Gg. Kelirahan RT.04/RW.02, Gg. Melirahan RT.05/RW.05	Gg.H.Hasan RT.003/RW.005, Gg. Kelirahan RT.04/RW.02, Gg. Melirahan RT.05/RW.05 Untuk Perawatan Jalan Gang Urutan @6 Unit untuk pemeliharaan jalan yang sudah gelap rasam keaktifan	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	fiat/ layunan	Pontianak Tenggara	Bangka Belitung Luar	kegiatan untuk pemeliharaan jalan dikarenakan jalan yang sudah gelap rasam keaktifan
			Pembangunan Perawatan Jalan Urutan	RT 004 / RW 007	Warga Masyarakat	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	fiat/ baru	Pontianak Tenggara	Banah Dasar	Jalan Perdana 6 Titik
			Pembangunan Perawatan Jalan Urutan	RT 005 / RW 007	Warga Masyarakat	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	fiat/ baru	Pontianak Tenggara	Banah Dasar	Jalan Sepakri 2 Ujung, 6 titik
			3 Kegiatan	Sub Jumlah		740,000,000	0	0	0	740,000,000	0				
	1 Program	3 Kegiatan	TOTAL			740,000,000	0	0	0	740,000,000	0				





Laporan Hasil Musranbang Kecamatan

Laporan Hasil Musranbang Kecamatan

Tahun Anggaran : 2021

Kecamatan : Pontianak Kota

NO	FUNGSI / PROGRAM	PROGRA														
1	2	3														
				Pengadaan dan Perbaikan Rambu-rambu Lalu Lintas	T. Alangang Gg. Kencana I RT. 003-BW. 003	2 Buah	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	fiskal baru	Pontianak Kota	Sungai Sangkong	Pemasangan Rambu Jalan
	Wajib Non Bayaran Dana Perimbangan	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ULAJ		Pengaspal Maris Jalan	RT. 002 / RW. 005	JALAN DI RT. 002 / RW. 005	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	fiskal baru	Pontianak Kota	Tengah	PEMBUATAN MARSA JALAN DAN PENASANGAN RAMBU JALAN 5 BUAH
				Perbaikan Sistem Tombol Penyebangan Pejalan Kaki (Pedestrian Crossing)	JALAN SEPANJANG RTU. 005	RT. 002 RW. 005	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	fiskal baru	Pontianak Kota	Tengah	BANTUAN PEMBUATAN ZEBRA CROSS
			Program Perbaikan dan Pemeliharaan Pererangan Jalan Umum (PTU)	Perbaikan Pererangan Jalan Umum (PTU)	RT. 002/ RW. 005	JALAN DAN GANG DI WILAYAH RW. 005	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	fiskal baru	Pontianak Kota	Tengah	BANTUAN PEMBUATAN LALU LINTAS PENERANGAN JALAN
				Perbaikan Pererangan Jalan Umum (PTU)	T. Perrel Sugaijaya RTU.012 sd RTU.014	10 set lampu dan tiang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	non_fiskal baru	Pontianak Kota	Sungai Jawi	Diperkirakan Lampu penerangan jalan umum
				Perbaikan Pererangan Jalan Umum (PTU)	Gg. Ambolet RTU.007	20 unit set	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	non_fiskal baru	Pontianak Kota	Sungai Jawi	Diperkirakan Lampu penerangan gang
				15 Kegiatan	Sub Jumlah		271.000.000	0	0	0	271.000.000	0				
			2 Program	15 Kegiatan	TOTAL		271.000.000	0	0	0	271.000.000	0				



Laporan Hasil Musranbang Kecamatan

Laporan Hasil Musranbang Kecamatan

Tahun Anggaran 2021

Kecamatan Pontianak Utara

NO	FUNGSI / URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TADGET SASARAN	SUMBER DANA				DANA TAHUN SEBELUMNYA	KETERANGAN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	
						APBD KOTA	APBD Prov	APBN	PARTISIPASI MASYARAKAT						Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kelembagaan	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sarana LLN	Peningkatan Perawatan Jalan Urban	Cg. Cahaya dan Cg. Refleksi Indah	12 Tang	0	0	0	0	0	0	0	Pontianak Utara	Sistem Tengah	Perawatan Tangg. Berik
			Peningkatan Perawatan Jalan Urban	Dusun Baru 218 RT/01 RW 01	100 Meter dan 1 Blok Bang	230,000,000	0	0	0	230,000,000	0	0	Pontianak Utara	Sistem Hilir	Perawatan Tangg. Berik
			Pengadaan dan Perawatan Perlebaran Lahu Lintas	T. 140 Pasang RW 21 Kelurahan Nelayan Hala Kecamatan Pontianak Utara	7 Blok	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	0	Pontianak Utara	Sistem Hilir	Perawatan sistem lalu lintas
			Peningkat Perawatan Instalasi Listrik RT	Lingsap RW 001		0	0	0	0	0	0	0	Pontianak Utara	Sistem Tengah	Perawatan Instalasi Tangg. Listrik
			Peningkat Perawatan Perawatan Jalan Urban	RT/001 RW 019		0	0	0	0	0	0	0	Pontianak Utara	Sistem Tengah	Pengawasan Tangg. Berik
			Peningkat Perawatan Perawatan Jalan Urban	RT/002 RW 013		0	0	0	0	0	0	0	Pontianak Utara	Sistem Tengah	Pengawasan Tangg. Berik
			Peningkat Perawatan Perawatan Jalan Urban	Cg. Hala Maran I RT/015		0	0	0	0	0	0	0	Pontianak Utara	Sistem Tengah	Tangg. Berik anak-anak
			Peningkat Perawatan Perawatan Jalan Urban	RT/001 RW 026		0	0	0	0	0	0	0	Pontianak Utara	Sistem Tengah	Tangg. Berik
			Peningkat Instalasi Listrik Perawatan Jalan Urban (RT)	T. 140 Pasang RW 21 Kelurahan Nelayan Hala Kecamatan Pontianak Utara		0	0	0	0	0	0	0	Pontianak Utara	Sistem Tengah	Perawatan Tangg. Berik Perawatan





Laporan Hasil Musranbang Kecamatan

Laporan Hasil Musranbang Kecamatan

Tahun Anggaran : 2021

Kecamatan : Pontianak Barat

NO	FUNGSI / URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET SASARAN	SUMBERDANA					Jumlah	DANA TAHUN SEBELUMNYA	KETERANGAN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
						APED KOCA	APED Prov	APEN	PARTISIPASI MASYARAKAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wajib Min. Pelayanan Dasar Perhubungan	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Peningkatan Jalan Utama (PTJ)	Pemeliharaan Merintis: Lampu PTJ	GG. Pemantingan RT.01 / RW.014, GG. Fajar Karya 2 RT.01/RW.026, Taman Perumahan 2 RW.11, GG. Kurnia 2 RT.02 / RW.025, GG. Kurnia 1 RT.03 / RW.029, Jln. Kaser GG. Pemantingan RT.03 / RW.026, Jln. Kaser, GG. Pemantingan RT.03 RW.026, GG. ri Dharma RT.06 / RW.25, GG. ri Dharma RT.06 / RW.25, Jln. Negeri: Hesa RW.020	Peningkatan Jalan utama	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	baru	Pontianak Barat	Sungai Belitang	Peningkatan Pemantingan Jalan (PTJ)	
			1 Kegiatan	Sub Jumlah		5.000.000	0	0	0	5.000.000	0					
			1 Program	1 Kegiatan	TOTAL	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0					



Laporan Hasil Musranbang Kecamatan

Laporan Hasil Musranbang Kecamatan

Tahun Anggaran : 2021

Kecamatan : Pontianak Timur

NO	FUNGSI URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET SASARAN	DUSKUMKADA				DANA TAHUN SEBELUMNYA	KETERANGAN	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN	
						APMD/KOTA	AEBD Priv	ALUN	PARTISIPASI NESEYARAKAT						Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Majelis Kota Pontianak Timur	Program Pengembangan Jalan dan Kawasan ASDE	Perencanaan Desain Sampah Komposter	Pangkajene Sempoa Kotido Permai	1 unit	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	tidak / baru	Pontianak Timur	Pantai Tiga	Sangat Sederang Perencanaan Sampah Saling Permai Kotido dan padanan. Masyarakat yang pelaksanaan dan perbaikan. Banyak tempat Perumahan yang ada sehingga antara pemerintah dan masyarakat dengan sangat memperhatikan perbaikan sampah ini.
		Program Pemeliharaan dan Perbaikan Perencanaan Jalan Utama (PUL)	Perencanaan Pemeliharaan Jalan Utama (PUL)	Tempat Jalan dan RT 001 RW 001 Kelurahan Hutan Sempoa	50 titik	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	tidak / baru	Pontianak Timur	Bujur Sempoa	Konkrete Jalan Aspal jalan yang sudah ada pemeliharaan, sehingga jalan lebih pemeliharaan pemeliharaan jalan utama.
			Perencanaan Pemeliharaan Jalan Utama (PUL)	Tempat Jalan dan RT 001 RW 001 Kelurahan Hutan Sempoa Sempoa	4 titik	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	tidak / baru	Pontianak Timur	Bujur Sempoa	Konkrete Jalan Aspal jalan yang sudah ada pemeliharaan jalan utama.
			Perencanaan Pemeliharaan Jalan Utama (PUL)	Tempat Jalan dan RT 001 RW 001 Kelurahan Hutan Sempoa Sempoa	50 titik	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	tidak / baru	Pontianak Timur	Bujur Sempoa	Konkrete jalan aspal jalan yang sudah ada pemeliharaan jalan utama dipandang perlu dengan pemeliharaan jalan utama.







	Perbaikan Perangas Jalan Umum (PDU)	Kelurahan Tanjung Hilir	Pengadaan tiang listrik RT 0075 betang tiang listrik	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	non_fisk / layanan	Pontianak Terra	Tanjung Hilir	Perbaikan Tiang Listrik RT 0075 untuk memperbaiki perangas jalan
	Perbaikan Perangas Jalan Umum (PDU)	Gg Dharma Putra	6 Tiang	15,000,000	0	0	1,200,000	16,000,000	0	fisk / baru	Pontianak Terra	Tambelar Sempit	
	Perbaikan Perangas Jalan Umum (PDU)	RT 004 EK001 Kel Tambelansari	9 Tiang	45,000,000	0	0	1,200,000	46,000,000	0	fisk / baru	Pontianak Terra	Tambelar Sempit	
	Perbaikan Perangas Jalan Umum (PDU)	Gg Harapan I RT 001 EK004	50 titik	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	fisk / baru	Pontianak Terra	Tambelar Sempit	
	Perbaikan Perangas Jalan Umum (PDU)	Gg H.M. Ismail	5 Tiak	15,000,000	0	0	300,000	15,300,000	0	fisk / baru	Pontianak Terra	Tambelar Sempit	
	Perbaikan Perangas Jalan Umum (PDU)	Gg. H. Abdul Kadir RT 006 EK001	10 Tiak	5,000,000	0	0	300,000	5,300,000	0	fisk / baru	Pontianak Terra	Tambelar Sempit	
	Perbaikan Perangas Jalan Umum (PDU)	RT 001 EK002 Kel Tambelansari	8 tiang	20,000,000	0	0	500,000	20,500,000	0	fisk / baru	Pontianak Terra	Tambelar Sempit	
	Perbaikan Perangas Jalan Umum (PDU)	RT 006 EK007	10 tiang	5,000,000	0	0	500,000	5,500,000	0	fisk / baru	Pontianak Terra	Tambelar Sempit	
	19 Kegiatan	Sub Jumlah		363,600,000	0	0	3,500,000	367,100,000	0				
1 Program	19 Kegiatan	TOTAL		363,600,000	0	0	3,500,000	367,100,000	0				



### Laporan Hasil Musrabang Kecamatan

Laporan Hasil Musrabang Kecamatan

Tahun Anggaran : 2021

Kecamatan : Pontianak Selatan

NO	FUNGSI URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET SASARAN	SUMBERDANA					DANA TAHUN SEBELUMNYA	KETERANGAN KECAMATAN	KELOMPOK	KETERANGAN	
						APBD KOTA	APBD Prov	AFBN	PARTISIPASI MASYARAKAT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wajib Non Selayanar Desa Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLA7	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	II. Palau We dan II. Lombok RW 05 Kal. Akcaya	6 tiang tiang x Rp. 7.500.000,-	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0	fiskal baru	Pontianak Selatan	Akcaya	Penerangan/Pemasangan Tiang Listrik untuk II. Palau We dan II. Lombok RW 05 Kal. Akcaya, merupakan salah satu prioritas di bidang fisik dan prasarana.
			1 Kegiatan	Sub Jumlah		45.000.000	0	0	0	45.000.000	0				
		1 Program	1 Kegiatan	TOTAL		45.000.000	0	0	0	45.000.000	0				





---

Dari usulan-usulan dan aspirasi masyarakat melalui proses musrenbang, maka aspirasi tersebut diserap kedalam program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang juga disesuaikan dengan kemampuan atau besaran pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran, sehingga pengusulan program dan kegiatan akan menyesuaikan dengan anggaran dan usulan serta kebutuhan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peluang daerah untuk mengelola pembangunannya secara mandiri semakin terbuka lebar. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik ( good governance ).

Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, implementasinya perlu dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, keselarasan dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan tentunya sangat diperlukan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan perencanaan pembangunan pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan nasional, sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta



menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Keterkaitan dan keselarasan dalam hal perencanaan program bidang perhubungan terhadap kebijakan nasional dapat dilihat dari keselarasan antara Renstra kementerian perhubungan serta terhadap Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat. Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalbar diuraikan sebagai mana berikut :

### **3.1.1. Renstra Kementerian Perhubungan**

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

**Adapun Visi Kementerian Perhubungan adalah :**

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”

**Penjelasan dari Visi ini yaitu :**

- 1. Pelayanan Perhubungan yang handal**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



2. **Pelayanan Perhubungan yang berdaya saing**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
  
3. **Pelayanan Perhubungan yang memberikan nilai tambah**, yaitu penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

**Sedangkan Misi Kementerian Perhubungan adalah :**

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. **Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan.**

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. Selain itu, dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM



transportasi, membenahan regulasi di bidang keselamatan / keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

**2. Melaksanakan Konsolidasi melalui Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan.**

Melalui restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi semakin memperjelas peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa Perhubungan.**

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

**4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan Yang Handal dan Memberikan Nilai Tambah.**

Pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan



peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Untuk itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah harus dapat mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perhubungan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak di Bidang Perhubungan, yaitu :

1. Peran Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), membenahi sistem keselamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi, serta pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Pembenahan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi di Kota Pontianak.
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi di Kota Pontianak.



4. Peningkatan kinerja pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat sehingga tercipta kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang di Kota Pontianak.

### 3.1.2. Renstra Dishubkominfo Propinsi

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat, maka Visi dari Dinas Perhubungan Propinsi yaitu :

**“ Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi, yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman dan harga yang wajar ”.**

Agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan dengan harapan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat, maka Visi tersebut dituangkan kedalam Misi.

Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Transportasi, dengan melibatkan pihak lain.
2. Membuka keterisolasian daerah pedalaman dan daerah terpencil.
3. Memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan jasa Transportasi.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, kreatif dan produktif.
5. Memperluas penyebaran produk sektor unggulan dan sektor lain di Propinsi Kalimantan Barat.
6. Mewujudkan masyarakat pengguna jasa transportasi yang berdisiplin.

Berdasarkan Pernyataan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak di Bidang Perhubungan, yaitu :



1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi.
2. Meningkatkan Aksesibilitas antar kawasan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di Bidang Perhubungan.
4. Meningkatkan SDM di Bidang Perhubungan.
5. Meningkatkan Disiplin dan Kesadaran Masyarakat dalam ber Lalu Lintas

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota, telaahan terhadap Visi, Misi Kementerian Perhubungan dan Visi Misi Dinas Perhubungan Propinsi Kalbar sebagaimana dituangkan di atas, serta mencermati kondisi terkini dan isu-isu penting yang kemudian dirumuskan dan dianalisa, maka untuk memadukan, mengarahkan menggerakkan serta memberikan kekuatan, semangat dan komitmen dalam menjalankan roda organisasi, ditetapkanlah Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk periode tahun 2020-2024, sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini :

#### **3.2.1. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak**

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari Visi, Misi Walikota serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh kementerian dan Dinas Perhubungan Propinsi yang dirumuskan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kota Pontianak yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang perhubungan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota. Jadi berdasarkan Permasalahan yang dan dan dipadukan dengan telaahan terhadap Visi dan Misi Walikota serta telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Dinas Perhubungan Propinsi, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok yang ada yang harus ditangani dan menjadi fokus untuk periode 5 tahun kedepan (2020-2024), dalam mencapai Misi





ke 2 Walikota Pontianak yaitu “*Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif*” adalah bagaimana Dinas Perhubungan Kota Pontianak berupaya memberikan pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, serta meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan tujuan khusus Bidang Perhubungan yang telah dituangkan didalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020–2024 berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Pontianak adalah :

**“*Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak*”**

Dengan dirumuskannya tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian dari Misi ke 2 Walikota Pontianak dalam menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.

**3.2.2. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak**

Sasaran Strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi dari masalah pokok yang dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai pada periode 5 tahun.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan adalah sasaran dibidang perhubungan (transportasi darat dan sungai) yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020–2024. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan sebelum Penyelarasan Kinerja RPJMD dalam upaya pencapaian tujuan



“Meningkatkan Kualitas Transportasi Di Kota Pontianak”, terdiri dari 3 sasaran yaitu :

- 1) ***Meningkatnya Cakupan Penerangan Jalan Umum di Kota Pontianak.***
- 2) ***Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi di Kota Pontianak.***
- 3) ***Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan di Kota Pontianak.***

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada tahun 2020-2024 sebelum adanya Penyelarasan Kinerja RPJMD Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.2.2.a

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

No.	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak.	Rata-Rata Waktu Tempuh  $t = \frac{\text{Jarak}}{\text{Kecepatan}}$	0,05 jam	0,05 jam	0,05 jam	0,05 jam	0,05 jam	1.1. Meningkatnya Cakupan Penerangan Jalan Umum di Kota Pontianak.	1.1.1. Indek Penerangan Jalan Umum  <i>Formulasi :</i> (Persentase cakupan Penerangan Jalan Umum + Persentase Cakupan Jalan Lingkungan) : 2	91,09 %	92,74 %	94,39 %	96,03 %	97,68 %
							1.2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi di Kota Pontianak.	1.2.1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Transportasi.  <i>Formulasi :</i> (Jumlah persentase ketersediaan fasilitas transportasi yang baik)		78,59 %	80,53 %	83,33 %	85,27 %	87,20 %
							1.3. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan.	2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak.  <i>Formulasi :</i> (Volume / Capacity Ratio)		B 0,32	B 0,28	B 0,24	A 0,20	A 0,18
										Tingkat Layanan	Tingkat Layanan	Tingkat Layanan	Tingkat Layanan	Tingkat Layanan



Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan sesuai dengan Penyelarasan Kinerja RPJMD Kota Pontianak dalam upaya pencapaian tujuan “*Meningkatkan Kualitas Transportasi Di Kota Pontianak*”, menjadi 2 sasaran yaitu :

- 1. *Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***
- 2. *Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan***

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada tahun 2020-2024 sesuai dengan Penyelarasan Kinerja RPJMD Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.2.2.a  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

No.	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak.	Rata-Rata Waktu Tempuh	0,05 jam	0,05 jam	0,05 jam	0,05 jam	0,05 jam	1.1. Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.1.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	8	8	8	8	8
								1.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	1.2.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80%	80%	80%	82%	82%

---

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan yaitu dari Tahun 2020-2024 dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Program-program pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak tentunya sesuai dan sebagai upaya dalam pencapaian Visi dan Misi Walikota yang ditetapkan, yang mengacu kepada apa yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kota Pontianak yang dituangkan dalam Visi dan Misi Kepala Daerah (Pemerintah Kota Pontianak).

Dasar dalam menetapkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tentunya berdasarkan telaahan dan analisa dari Visi, Misi Walikota serta telaahan dari Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Pontianak khususnya Bidang Perhubungan tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam penetapan program dan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ
- 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- 3) Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ
- 4) Program Pembangunan dan Pemeliharaan PJU
- 5) Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 6) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP
- 7) Program Peningkatan Pelayanan ASDP
- 8) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Sedangkan Program-program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk Tahun 2020 terdiri dari 15 Program dan 60 Kegiatan berdasarkan Renstra tahun 2020-2024. Adapun program dan kegiatan tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Pontianak, sebagaimana berikut :

---

### **Program dan Kegiatan Rutin Administrasi Perkantoran :**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  - 1) *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
  - 2) *Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.*
  - 3) *Penyediaan Alat Tulis Kantor*
  - 4) *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
  - 5) *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.*
  - 6) *Penyediaan Makanan dan Minuman*
  - 7) *Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.*
  - 8) *Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran*
  - 9) *Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah.*
  - 10) *Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Keuangan.*
  - 11) *Penyediaan Jasa Kebersihan, Supir dan Pengamanan Kantor*
  - 12) *Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak*
  
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor.
  - 1) *Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*
  - 2) *Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.*
  - 3) *Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.*
  - 4) *Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*
  - 5) *Peningkatan Gedung Kantor*
  
3. Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur.
  - 1) *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.*
  
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  - 1) *Pendidikan dan Pelatihan Formal.*
  
5. Program Peningkatan Pelayanan Prima.
  - 1) *Survey Kepuasan Masyarakat dan Penyusunan Dokumen IKM.*

- 
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
    - 1) *Penyusunan Rencana Kerja.*
    - 2) *Penyusunan Laporan Capaian Kinerja.*
    - 3) *Penyusunan Dokumen Kelengkapan TU Aparatur Sekretariat.*
  7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan.
    - 1) *Penyusunan Laporan Keuangan.*

**Program dan Kegiatan Pokok Pembangunan (Strategis) :**

Program Pembangunan Prasarana dan Sarana LLAJ.*Error! Not a valid link.*

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.*Error! Not a valid link.*

Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan.*Error! Not a valid link.*

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).*Error! Not a valid link.*

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.*Error! Not a valid link.*

Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ.*Error! Not a valid link.*

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).*Error! Not a valid link.*

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. *Error! Not a valid link.*

Dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terjadi penyesuaian untuk penyelarasan kinerja pada tahun 2021. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

*Indikator Program : Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan.*

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



---

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/  
/Triwulanan/Semesteran SKPD
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan  
SKPD

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan  
Kantor
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
4. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
pada SKPD
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mebeleur

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor  
dan Bangunan Lainnya

- 
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
    1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
  7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
    3. Evaluasi Perangkat Daerah

## **2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

*Indikator Kegiatan : Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar.*

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
  1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  2. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
  4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
  1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota.

- 
2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota
  3. Forum Lalu Lintas dan Angkutran Jalan Kabupaten/Kota
  3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.  
Sub Kegiatan :
    1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.  
Sub Kegiatan :
    1. Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
  5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  
Sub Kegiatan :
    1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan
    2. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

### **3. Program Pengelolaan Pelayaran**

*Indikator Program : Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan.*

1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.  
Sub Kegiatan :
  1. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
  2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
  3. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

---

Sedangkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai penyesuaian Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk Tahun 2021 terdiri dari 3 Program, 13 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2021 sesuai pagu indikatif yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021  
Dinas Perhubungan Kota Pontianak  
(Sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019)

Program	Indikator Program	Kondisi Awal	Target Capaian 2021		Kondisi Akhir	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Awal	Target 2021		Kondisi Akhir	Sub Kegiatan	Jabatan Penanggung Jawab	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Awal	Targ 2021		Kondisi Akhir				
			K	Rp					K	Rp						K	Rp					
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	80,00%	31.220.364.816			Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	16 Jenis	26.706.648.345	15 Jenis		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyediaan Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan		7 Jenis	3.535.192.030					
																			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Dibangun	1 Paket	107.115.000
	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	80,00%					Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	3 Kegiatan	1.064.746.000	3 Kegiatan	Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen hasil rekayasa lalu lintas yang dibuat	1 Dokumen	100.950.000						
																		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan pengawasan dan rekayasa lalu lintas	25 lokasi	865.696.000	
																						Forum Lalu Lintas dan Angkutran Jalan Kabupaten/Kota
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang yang Tersedia	5 Bus	10 Bus	1.289.460.900	10 Bus	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tersedianya Bus BRT Dalam Kondisi Baik.	5 Unit	10 Unit	1.220.500.700										
														Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	365 hari	365 hari	68.960.200				
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik parkir	300 titik	300 titik	1.655.839.063	300 titik	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik parkir	300 titik	1.655.839.063											
													Pemeriksaan Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	16000 unit	16300 unit	503.670.508	17500 unit	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Alat Pengujian yang dilakukan pemeliharaan	2 paket
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	144 Hari	78.033.581																		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Disediakan																



Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80,00%	952.721.700	82%	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	3 Kegiatan	952.721.700,00	3 Kegiatan	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan yang dibangun	1 paket	78.990.000,00	
											Tersedianya Pemenuhan Pelabuhan dan Dermaga kota Pontianak serta fasilitas yang dibangun			
											Tersedianya Fasilitas Dermaga Apung			
											Tersedianya Fasilitas Dermaga Sampan Bermotor			
											Tersedianya Dokumen Pengembangan Pelabuhan/ Dermaga Kota Pontianak.			
											Tersedianya CCTV pada Kawasan Pelabuhan/Dermaga dan Tepian Sungai.			
										Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	365 hari	561.494.100,00	
											Tersedianya Fasilitas Dermaga Pedalaman dalam kondisi baik.	2 fasilitas		
											Tersedianya Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Bardan - Siantan dalam kondisi baik.	2 fasilitas		
											Tersedianya Peralatan Pelabuhan Penyeberangan Bardan - Siantan dalam kondisi baik.	8 fasilitas		
											Terlaksananya kelancaran aktifitas Pelabuhan dan Dermaga Pemerintah Kota Pontianak.	7200 hari sandar		
											Terlaksananya Kelancaran aktifitas pelayanan pelabuhan penyeberangan.	#### trip		
										Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pengawasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	144 Hari	312.237.600,00	
											Terciptanya ketertiban dan keamanan Angkutan Sungai dan Lalu Lintas Sungai Wilayah Kota Pontianak.	#### SPB		



Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	100%	14.819.334.441	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	11.807.809.165,00	12 bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	11.226.002.957,00								
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15 dokumen	17.026.208,00								
													Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	564.780.000,00							
													Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan surat menyurat	12 bulan	12.500.000,00							
													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan	239.510.322,00							
													Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	120.000.000,00							
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	177.734.800,00							
														Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	1.263.079.118,00	12 bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	17.378.633,00
														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	10.000.000,00						
														Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jangka waktu fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	15.900.000,00						
														Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jangka Waktu dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	38.000.000,00						
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	99.535.000,00						
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 paket	335.163.433,00						
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	286.171.042,00						
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	460.931.010,00						
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 paket	95.014.956,00	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	29.819.000,00		
															Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit mebeleur	1 paket	65.195.956,00					
															Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	29 unit	880.737.000,00	29 unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	26.499.000,00
															Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	19 unit	604.240.600,00					
															Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	38.750.000,00					
															Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 jenis	128.309.400,00					
															Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit rumah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat rumah Gedung Kantor	1 unit	82.938.000,00					







## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tentunya dilakukan dengan menetapkan langkah-langkah strategis, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak perlu menetapkan strategi dan kebijakan agar pelaksanaan program dan kegiatan menjadi terarah dan terpadu.

**Strategi** adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Walikota. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

**Kebijakan** merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020, sebelum Penyelarasan Kinerja RPJMD sebagaimana berikut:

#### 1. **Sasaran Strategis 1** :

***“Meningkatnya Cakupan Penerangan Jalan Umum di Kota Pontianak”.***

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 1 Strategi, yaitu ***“Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum”***, yang ditempuh dengan Kebijakan :

- a. Melakukan Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan.
- b. Peningkatan pengawasan dan pemantauan serta pemasangan Meterisasi PJU.



- c. Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana pendukung Operasional PJU.

2. **Sasaran Strategis 2** :

*“Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi”.*

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 4 Strategi, yaitu :

- a. **Strategi 2** : Pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
- b. **Strategi 3** : Meningkatkan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
- c. **Strategi 4** : Meningkatkan fungsi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- d. **Strategi 5** : Meningkatkan Prasarana dan Sarana ASDP.

**Kebijakan** yang ditempuh untuk melaksanakan strategi 2 sampai dengan strategi 5, yaitu :

- a. Melakukan pengadaan fasilitas APILL.
- b. Melakukan pembuatan Zebra Cross, Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Marka Jalan dan Marka Parkir.
- c. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
- d. Pengadaan dan pengembangan CCTV/ATCS.
- e. Pengadaan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan lainnya.
- f. Meningkatkan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
- g. Melakukan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas.
- h. Pemeliharaan dan peningkatan CCTV/ATCS.
- i. Peningkatan Traffic Light.
- j. Peningkatan fungsi melalui optimalisasi operasional peralatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Dermaga dan Pelabuhan.
- k. Pembangunan pelabuhan dan dermaga Kota Pontianak.
- l. Peningkatan sarana pendukung fasilitas dermaga dan pelabuhan serta pengawasan.
- m. Pengadaan CCTV dan perangkatnya untuk kawasan tepian sungai.



- n. Penyusunan master plan rencana detail penataan dan pengembangan dermaga dan pelabuhan Kota Pontianak.

3. **Sasaran Strategis 3 :**

*“Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan Kota Pontianak”.*

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 3 Strategi, yaitu :

- a. **Strategi 6** : Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ.
- b. **Strategi 7** : Peningkatan Pelayanan ASDP.
- c. **Strategi 8** : Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

**Kebijakan** yang ditempuh untuk melaksanakan Strategi 6 sampai dengan Strategi 8 ini, yaitu :

- a. Melakukan pengawasan dan patroli serta penjagaan lalu lintas, parkir dan terminal.
- b. Penyusunan rencana dan masterplan transportasi kota pontianak serta pendataan lalu lintas.
- c. Meningkatkan koordinasi antar instansi teknis dan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.
- d. Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertiban Dermaga dan Pelabuhan serta Angkutan sungai.
- e. Meningkatkan pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan.
- f. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan Angkutan umum dan barang.
- g. Meningkatkan Sarana peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- h. Meningkatkan fasilitas prasarana pengujian kendaraan bermotor.
- i. Meningkatkan kualitas pelayanan.

Dari 8 strategi dengan beberapa arah kebijakan yang dituangkan di atas, akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menetapkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota tahun 2020-2024.



Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 4.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024 DALAM PENCAPAIAN MISI 2 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

VISI PEMERINTAH KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.				
Misi II PEMERINTAH KOTA : Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif.				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1. Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak	1.1. Meningkatnya Cakupan Penerangan Jalan Umum di Kota Pontianak.	1.1.1. Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	1.1.1.1. Melakukan Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan 1.1.1.2. Peningkatan pengawasan dan pemantauan serta pemasangan Meterisasi PJU 1.1.1.3. Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana pendukung Operasional PJU	
		1.2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi di Kota Pontianak.	1.2.1. Pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.2.1.1. Melakukan pengadaan fasilitas APILL 1.2.1.2. Melakukan pembuatan Zebra Cross , Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Marka Jalan dan Marka Parkir 1.2.1.3. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas 1.2.1.4. pengadaan dan pengembangan CCTV/ATCS 1.2.1.5. Pengadaan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan lainnya.
			1.2.2. Meningkatkan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.2.2.1. Meningkatkan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.2.2.2. Melakukan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas 1.2.2.3. Pemeliharaan dan peningkatan CCTV/ATCS 1.2.2.4. Peningkatan Traffic Light
	1.2.3. Meningkatkan fungsi Prasarana Dermaga Sungai Danau dan Penyeberangan		1.2.3.1. Peningkatan fungsi melalui optimalisasi operasional peralatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Dermaga dan Pelabuhan	
	1.2.4. Meningkatkan Prasarana dan Sarana ASDP		1.2.4.1. Pembangunan pelabuhan dan dermaga Kota Pontianak 1.2.4.2. peningkatan sarana pendukung fasilitas dermaga dan pelabuhan serta pengawasan 1.2.4.3. pengadaan CCTV dan perangkatnya untuk kawasan tepian sungai 1.2.4.4. Penyusunan master plan rencana detail penataan dan pengembangan dermaga dan pelabuhan Kota Pontianak	
	1.3. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan Kota Pontianak.	1.3.1. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	1.3.1.1. Melakukan pengawasan dan patroli serta penjagaan lalu lintas, parkir dan terminal 1.3.1.2. penyusunan rencana dan masterplan transportasi kota pontianak serta pendataan lalu lintas 1.3.1.3. meningkatkan koordinasi antar instansi teknis dan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan rekayasa lalu lintas	
			1.3.2. Peningkatan Pelayanan ASDP	1.3.2.1. Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertiban Dermaga dan Pelabuhan serta Angkutan sungai 1.3.2.2. Meningkatkan pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan
		1.3.3. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1.3.3.1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan Angkutan umum dan barang 1.3.3.2. Meningkatkan Sarana peralatan pengujian kendaraan bermotor 1.3.3.3. Meningkatkan fasilitas prasarana pengujian kendaraan bermotor 1.3.3.4. Meningkatkan kualitas pelayanan	



Dengan adanya Penyelarasan Kinerja RPJMD, Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2021 berubah menjadi 2 Sasaran Strategis dan 6 kebijakan, sebagaimana berikut:

1. **Sasaran Strategis 1** :

**“Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.**

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 5 Strategi, yaitu :

- a. Strategi 1 : Meningkatkan perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak.
- b. Strategi 2 : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
- c. Strategi 3 : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Strategi 4 : Penyelenggaraan dan Pengawasan Fasilitas Parkir
- e. Strategi 5 : Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi 1 sampai dengan strategi 5, yaitu :

- a. Menyediakan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
- b. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- c. Menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- e. Menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

2. **Sasaran Strategis 2 :**

**“Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan”**

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 1 Strategi, yaitu :

- a. Strategi 6 : Pelaksanaan Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengawasan Pelabuhan Sungai dan Danau.

Yang ditempuh dengan kebijakan :

- a. Membangun dan Menerbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.



Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 setelah Penyelarasan Kinerja RPJMD, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.1  
 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBUJAKAN  
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024 DALAM PENCAPAIAN MISI 2 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

VISI PEMERINTAH KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

MISI II PEMERINTAH KOTA : Menciptakan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Representatif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBUJAKAN		
1. Meningkatnya kualitas transportasi	1.1. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.1.1.	Meningkatkan perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak	1.1.1.1.	Menyediakan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak	
		1.1.2.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.1.1.2.	Melaksanakan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
		1.1.3.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.1.1.3.	Menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		1.1.4.	Penyelenggaraan dan Pengawasan Fasilitas Parkir	1.1.1.4.	Menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
		1.1.5.	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.1.1.5.	Menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
	1.2. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	1.2.1	Pelaksanaan Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengawasan Pelabuhan Sungai dan Danau		1.2.1.1.	Membangun dan Menerbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau





Berdasarkan Strategi dan Kebijakan inilah rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pontianak serta rencana pendanaannya ditetapkan.

Adapun Program-program pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada tahun 2021 yang diusulkan pada Forum SKPD Kota Pontianak dengan prioritas kegiatan dan penyerapan aspirasi masyarakat yang disampaikan, dengan total sebanyak 3 Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Rutin Administrasi Perkantoran dan 2 (dua) Program Pokok Pembangunan (Program Strategis), dengan 13 kegiatan serta 41 sub kegiatan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan 1 (satu) Program Rutin Administrasi Perkantoran dan 2 (dua) Program Pokok Pembangunan tersebut di atas, maka rencana kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

*Indikator Program : Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan.*

##### **1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

*Indikator Kegiatan : Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah.*

Sub Kegiatan :

##### **1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD**

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.*

##### **2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

*Indikator Sub Kegiatan : Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.*

##### **2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

*Indikator Kegiatan : Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum*

Sub Kegiatan :

##### **1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**



- Indikator Sub Kegiatan : Jangka waktu penyediaan surat menyurat*
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
*Indikator Sub Kegiatan : Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik*
  3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
*Indikator Sub Kegiatan : Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor*
  4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
*Indikator Sub Kegiatan : Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor*
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
*Indikator Kegiatan : Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah.*
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
*Indikator Sub Kegiatan : Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan*
  2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  
*Indikator Sub Kegiatan : Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*
  3. Fasilitasi Kunjungan Tamu  
*Indikator Sub Kegiatan : Jangka waktu fasilitasi kunjungan tamu*
  4. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  
*Indikator Sub Kegiatan : Jangka Waktu dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.*
  5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
*Indikator Sub Kegiatan : Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*
  6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor*
  7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor



*Indikator Sub Kegiatan : Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor*

8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

*Indikator Sub Kegiatan : Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan.*

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

*Indikator Kegiatan : Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional*

2. Pengadaan Mebeleur

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit mebeleur*

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

*Indikator Kegiatan : Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara.*

Sub Kegiatan :

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi*

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

*Indikator Sub Kegiatan : jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara*

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

*Indikator Sub Kegiatan : jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara*

4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara*

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit rumah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat*

6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

*Indikator Kegiatan : Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya.*

Sub Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi*

2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya*

7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

*Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.*

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun*

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun*

3. Evaluasi Perangkat Daerah

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun.*

## **2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

*Indikator Kegiatan : Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar.*

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota



*Indikator Kegiatan : Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan.*

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan.*

2. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Prasarana Jalan yang Dibangun.*

3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang dilaksanakan.*

4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Prasarana Jalan yang Direhab atau Dipelihara.*

2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

*Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.*

Sub Kegiatan :

1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota.

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen hasil rekayasa lalu lintas yang dibuat.*

2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah lokasi yang dilakukan pengawasan dan rekayasa lalu lintas.*

3. Forum Lalu Lintas dan Angkutran Jalan Kabupaten/Kota

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Bidang LLAJ.*

3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

*Indikator Kegiatan : Jumlah Angkutan Orang yang Tersedia.*



Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

*Indikator Sub Kegiatan : Persentase Tersedianya Bus BRT Dalam Kondisi Baik.*

2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

*Indikator Sub Kegiatan : Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang.*

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.

*Indikator Kegiatan : Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran.*

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran*

5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

*Indikator Kegiatan : Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji.*

Sub Kegiatan :

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Alat Pengujian yang dilakukan pemeliharaan*

2. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor*

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Disediakan.*



### 3. Program Pengelolaan Pelayaran

*Indikator Program : Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan.*

1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

*Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan.*

Sub Kegiatan :

1. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan yang dibangun.*

2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan.*

3. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

*Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengawasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan.*

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, bahwa Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, yaitu penyesuaian dari kebutuhan anggaran minimal sesuai Renstra yang dilakukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) dengan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Bappeda Kota Pontianak, dari 3 Program yang telah ditetapkan dan yang diusulkan sesuai Renstra Dinas Perhubungan Kota (Penyelarasan Kinerja RPJMD Kota Pontianak) Pontianak untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp46.992.420.957,- .

Adapun penyesuaian pagu anggaran masing-masing program, sebagaimana yang tertuang di Renstra (Penyelarasan Kinerja RPJMD Kota Pontianak) dengan penyesuaian terhadap pagu yang ditetapkan untuk tahun 2021, adalah sebagai berikut :

#### a. Program dan Kegiatan Bidang/Urusan Kesekretariatan

- 1) *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.*



Program ini untuk tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp14.819.334.441,-.

**b. Program dan Kegiatan Bidang/Urusan Perhubungan**

1) *Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).*

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp31.220.364.816,-.

2) *Program Pengelolaan Pelayaran.*

Pada program ini tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp952.721.700,-.





## BAB V

## PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Rencana Kerja yang merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin Dinas beserta jajarannya dalam merealisasikan Visi dan Misi Walikota yang merupakan acuan dasar untuk pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan kebijakan pada tahun yang ditetapkan. Dengan demikian, Rencana Kerja bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana di atasnya (Renstra PD, RKPD dan RPJMD Kota Pontianak) serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Sesuai dengan Realistis Kebutuhan Anggaran untuk pencapaian program-program yang ditetapkan yang dituangkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yaitu untuk pemenuhan unsur kegiatan Rutin (administrasi dan operasional rutin), Kegiatan Operasional (Pengawasan, Pengendalian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi) dan kegiatan untuk Investasi (pemenuhan Sarana dan Prasarana). Adapun secara keseluruhan kebutuhan anggaran minimal untuk Belanja tahun 2021 berdasarkan kebutuhan minimal yang dituangkan ke dalam Renstra 2020-2024 sesuai Penyelarasan Kinerja RPJMD adalah sebesar Rp46.368.295.258,-.



Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, yaitu penyesuaian dari kebutuhan anggaran minimal sesuai Renstra dengan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Bappeda Kota Pontianak, bahwa alokasi anggaran (pagu Indikatif) untuk Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2021 yaitu sebesar Rp46.992.420.957,- setelah dilakukan analisis dan penyesuaian dengan pagu indikatif yang ditetapkan, maka usulan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 dialokasikan untuk urusan Kesekretariatan sebesar Rp14.819.334.441,-, dan urusan Perhubungan sebesar Rp32.173.086.516,-.

Program-program yang akan dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2021 dengan total 3 Program, 13 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Urusan Kesekretariatan) dengan 7 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan serta pada Program Pokok Pembangunan (Urusan Perhubungan) yang terdiri 2 (dua) program dengan 6 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pontianak menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak memiliki Tujuan dan Sasaran yang selaras dengan apa yang dituangkan dalam Renstra Kota dengan program dan kegiatan yang realistis sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Kota Pontianak tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian jika program dan kegiatan yang diusulkan memang secara prinsip harus disesuaikan. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk Menjadikan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang lebih baik.